



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)**

---

Tahun Sidang : 2011 – 2012  
Masa Sidang : II  
Rapat : Ke - 2 (dua)  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Hari/Tanggal : Senin, 28 November 2011  
Sifat : Terbuka  
Pukul : 14.30 WIB s.d 18.15 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)  
Acara : - Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2011; dan  
- Evaluasi Pelaksanaan APBN 2011.  
Ketua Rapat : Ir. H. Mulyadi  
Sekretaris : Dra. Hani Yuliasih  
Hadir Anggota : dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI  
Hadir Mitra : Menteri Perhubungan beserta jajaran terkait lainnya.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 14.30 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan pada hari ini adalah untuk membahas tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2011 dan evaluasi pelaksanaan APBN 2011.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Perhubungan untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk segera menindaklanjuti semua rekomendasi atas 15 temuan hasil pemeriksaan BPK untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Pemerintah yang transparan dan akuntabel.
2. Komisi V DPR RI prihatin terkait capaian realisasi anggaran Kementerian Perhubungan TA 2011 yang hingga 22 November 2011 tercatat sebesar 57,42% keuangan dan fisik 67,47%, selanjutnya Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan capaian mendekati 100% baik realisasi fisik maupun keuangan, dengan segera menyelesaikan berbagai penyebab permasalahan rendahnya serapan anggaran.
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan melakukan langkah yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan anggaran yang diblokir pada TA 2011 yang tercatat sebesar Rp 1,117 Triliun atau 4,80%.
4. Terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk melakukan penertiban dan audit serta pemisahan aset tetap di lingkungan Kementerian Perhubungan.
5. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk melakukan inventarisasi tingkat kerawanan Kawasan Keselamatan Operasi bandara di Indonesia khususnya bandara perintis dan menyampaikannya kepada Komisi V DPR RI.
6. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk segera menyelesaikan seluruh peraturan perundang-undangan turunan yang diamanatkan Undang-Undang bidang transportasi.

Catatan :

Komisi V DPR RI menyarankan agar Kementerian Perhubungan memberikan perhatian serius berkenaan dengan fungsi lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan serta lalu lintas angkutan jalan, selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk ikut serta dalam investigasi runtuhnya jembatan di Kutai Kertanegara.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.15 WIB.

Jakarta, 28 November 2011

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

ttd

**E.E. MANGINDAAN**

**KETUA RAPAT,**

ttd

**H. MULYADI**

